

Pipa Saluran Air Gunung Rusak, Warga Cijeruk Kesulitan Air Bersih

BOGOR (IM)- Akibat rusaknya pipa saluran air bersih yang mengalirkan air gunung ke rumah-rumah warga, membuat 559 jiwa di Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor mengalami kesulitan air bersih.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Bogor, Asep Sulaiman mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan pihaknya pada Kamis (20/7) didapat bahwa adanya ratusan jiwa yang mengalami kesulitan air bersih.

Ratusan jiwa yang mengalami krisis air bersih ini berada di Kampung Gegerbitung, RT. 01/04, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

“Dikarenakan pipa saluran air bersih yang dari Sumber (Gunung) tersumbat dan mengalami kerusakan, air bersih yang biasa digunakan warga mengalami krisis air bersih,” kata Asep melalui keterangan-

nya, Jumat (21/7).

Atas hal tersebut, Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Bogor pun bergerak cepat mengirim bantuan air bersih sebanyak 5.000 liter.

Bantuan air tersebut, kata Asep, diharapkan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari 559 jiwa atau 139 Kartu Keluarga (KK).

“Situasi saat ini, 5.000 liter air dari tangki disuplai langsung ke warga yang terdampak kesulitan air bersih,” terangnya.

Dari analisa di lapangan, lanjut Asep, masyarakat membutuhkan penangan dan perbaikan saluran air bersih di lokasi tersebut.

“Dibutuhkan penangan serta perbaikan terhadap kerusakan, dan juga perbaikan pada pipa saluran air dari pihak terkait di wilayah tersebut,” pungkasnya. ● **gio**

Pemprov Jabar Luncurkan Bus Trans Pakuan Bogor Jadi Feeder LRT

BOGOR (IM)- Bus Trans Pakuan Bogor menjadi feeder untuk Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam penataan transportasi umum yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek.

Program transportasi ini ditandai dengan penandatanganan komitmen antara Pemprov Jawa Barat bersama lima wilayah aglomerasi yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di Halte Cidangi, Kota Bogor, Jumat (21/7).

“Kita memulai program Bus Rapid Transit (BRT) sebagai feeder untuk LRT Jabodetabek. Sehingga tadi kita mulai inisiatif bersama empat wilayah, Kota Depok, Kota Bogor, Bekasi, Kabupaten Bekasi,” ungkap Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil kepada wartawan, di lokasi.

Program ini merupakan komitmen Pemprov Jawa Barat untuk kelancaran ekonomi khususnya di aglomerasi Bodetabek, Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sehingga, masyarakat bisa

lebih mudah menjangkau transportasi.

“Sehingga warga bisa lancar ke Jakarta naik LRT, tapi naik LRT-nya naik bus yang kita feeder-kan dari berbagai lima wilayah tadi. Insya Allah mudah-mudahan dilancarkan, ditambah di tahun-tahun mendatang. Sehingga terkonversi lebih banyak yang naik kendaraan umum ketimbang sekarang naik kendaraan pribadi karena tidak ada pilihan yang memadai,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, baru terdapat dua unit Bus Trans Pakuan yang akan menjadi feeder menuju Stasiun LRT Cibubur.

Diharapkan, akan ada penambahan unit bus sesuai dengan kesepakatan dengan Transjakarta dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang sempat dilakukan pada Mei lalu. “Ini salah satu bentuk kolaborasi yang terus berlanjut antara kota-kota di Jawa Barat dengan Gubernur Jawa Barat Kang Emil, di penghujung masa tugasnya memperbaiki transportasi publik,” ucap Bima. ● **gio**

8 | Nusantara



KUNJUNGAN KERJA GUBERNUR JAWA BARAT DI BOGOR

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) berbincang dengan Wali Kota Bogor Bima Arya (kiri) saat meninjau pembangunan jembatan Otista, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/7). Kunjungan kerja Gubernur Jawa Barat di Kota Bogor tersebut dilakukan untuk meninjau pembangunan yang menggunakan anggaran berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ridwan Kamil: Jembatan Otista Bisa Jadi Ikon Baru Kota Bogor

Dalam kunjungannya Ridwan Kamil yang didampingi Wali Kota Bogor, Bima Arya RK sempat mengoreksi desain jembatan. Ia meminta tembok pembatas pada sisi kanan dan kiri jembatan dibangun lebih indah. Ia juga meminta agar ada pemasangan lampu berbentuk klasik agar Jembatan Otista tampak lebih estetik. Dia menyebut jembatan Otista ini akan jadi ikon baru Kota Bogor.

BOGOR (IM)- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) meninjau proses pembangunan Jembatan Otista di

Jl Otista Kota Bogor. RK menyebut jembatan Otista akan jadi ikon baru Kota Bogor.

“Hari ini saya mengin-

speksi program kebutuhan masyarakat Kota Bogor, yaitu kelancaran lalu lintas di Jalan Otista. Di mana itu terjadi penyempitan karena jembatannya sempit, warisan dari zaman kolonial. Dengan anggaran Rp 52,6 miliar dari Provinsi, kita bangun ulang, kita lebarakan,” kata RK di Jl Otista, Kota Bogor, Jumat (21/7).

“Sehingga di akhir tahun bahkan lebih cepat, kita akan menyaksikan lalu lintas sangat lancar, insyaallah, ekonomi juga meningkat, dan jembatannya bisa jadi ikon baru untuk masyarakat atau wisatawan yang datang ke Kota Bogor,” sambungnya.

Dalam kunjungannya, RK yang didampingi Wali Kota

Bogor, Bima Arya dan Dinas PUPR Kota Bogor, Rena Da Frina meninjau langsung ke titik pembangunan Jembatan Otista.

RK juga sempat mengoreksi desain jembatan. Ia meminta tembok pembatas pada sisi kanan dan kiri jembatan dibangun lebih indah. Ia juga meminta agar ada pemasangan lampu berbentuk klasik agar Jembatan Otista tampak lebih estetik.

“Saya titip mudah-mudahan lancar. Walaupun nanti di akhir tahun saya sudah tidak menjabat lagi jadi gubernur, tapi sebagai warga biasa Jawa Barat, saya ingin menyaksikan selesainya sebuah ikhtiar masyarakat Kota Bogor tercinta ini,” kata RK.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Rena Da Frina mengatakan, target progres pengerjaan di minggu ke-12 ini adalah 23,50 persen.

“Di awal minggu ini realisasi di lapangan sudah mencapai 23,75 persen dengan deviasi positif sebesar 0,25 persen,” kata Rena dalam keterangannya.

“Saat ini yang sedang dikerjakan adalah galian bore pile, jadi pondasi bor untuk jembatan trem. Untuk di sisi Kelurahan Baranangsiang itu sudah beres tinggal di sisi yang Babakan Pasar, itu sisa dua titik lagi. Jadi masing-masing ada 8 titik sebelah kiri dan ada 8 titik sebelah kanan,” katanya. ● **pra**

Ribuan Siswa di Jabar Curangi PPDB, Tak Boleh Daftar ke Sekolah Negeri

BANDUNG (IM)- Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat, Wahyu Mijaya mengatakan 4.791 siswa yang mencurangi dokumen penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023 tak bisa mendaftar ke sekolah negeri.

Meski demikian, ia mengatakan para pelajar itu bisa mendaftar ke sekolah swasta atau di luar pembiayaan pemerintah.

“Kami tidak bisa melanjutkan atau menerima calon siswa tersebut. Jadi, Insya Allah mereka bisa mengikuti atau daftar di sekolah-sekolah di luar sekolah pemerintah,” ujar Wahyu kemarin.

Walaupun telah melakukan kecurangan untuk mendaftar sekolah, Wahyu mengatakan pihak siswa tetap akan dipertanggungjawabkan sama dengan peserta PPDB lain tetap bersekolah melanjutkan pendidikannya.

Namun, dia menyarankan anak-anak tersebut masuk ke sekolah swasta ataupun mengikuti sekolah berbasis keluarga alias homeschooling. Sebab, pihaknya ingin anak-anak itu tetap bisa belajar dengan layak. “Pada intinya, sama dengan perilakunya terhadap siswa yang mengikuti PPDB ke sekolah negeri tetapi tidak masuk. Calon-calon siswa ini

tetap bisa mendaftar sekolah lain di luar sekolah sekolah pemerintah,” tuturnya.

Pada pelaksanaan PPDB 2023, kata dia, ada sekitar 519 ribu siswa yang mendaftar ke sekolah negeri di Jabar. Namun, hanya 300 ribu siswa yang bisa ditampung.

Wahyu juga membeberkan modus-modus mengalkali PPDB yang dilakukan setidaknya 4.791 siswa di Jabar tersebut. Dia menerangkan pihak siswa melakukan kecurangan saat diverifikasi pada proses PPDB tahap 1 hingga akhir tahap 2 atau sebelum masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS).

Beberapa kecurangan tersebut, kata dia, terkait dokumen yang tak sesuai dengan data. Salah satunya, alamat domisili yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) harus lebih dari satu tahun. “Kemudian sertifikat kejuruan minimal enam bulan terakhir, yang di-upload kurang dari itu. Sehingga tidak memenuhi syarat dokumennya,” kata dia.

Kemudian, Wahyu juga menerangkan ada beberapa dokumen siswa yang dianggap tidak asli. Contohnya, dokumen Kartu Keluarga (KK) yang tidak tersambung dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

“Lalu, bisa jadi nilai rapornya tidak sesuai dengan dokumen yang ada atau nilainya ditinggikan dari pada yang seharusnya. Kemudian, terkait sertifikatnya yang tidak sesuai,” tuturnya.

Di satu sisi, Wahyu mengatakan Disdik Jabar tetap akan mengalokasikan anggaran bantuan sebesar Rp2 juta untuk tiap anak dari keluarga tidak mampu yang tidak masuk ke sekolah negeri alias gagal PPDB.

Akan tetapi, kata dia, pemerintah hanya akan memberikan dana tersebut untuk masuk ke sekolah swasta dan tidak menanggung biaya lain..

“Kalau dia keluarga ekonomi atau tidak mampu kemudian daftar di sekolah negeri tidak diterima, akan tetapi di swasta, kami punya alokasi anggaran untuk membantu sebesar Rp2 juta. Hanya untuk biaya awalnya saja, seterusnya tidak ditanggung lagi,” ucapnya.

Wahyu menerangkan sekolah-sekolah swasta juga bisa mengajukan bantuan hibah kepada Dinas Pendidikan Jabar untuk membantu siswa yang tak mampu secara ekonomi. Sebelumnya, 4.791 siswa di Jawa Barat dibatalkan dalam proses PPDB 2023 karena kedapatan mengelabui domisili atau tempat tinggal. ● **pra**



KEJUARAAN NASIONAL ANGKAT BESI SENIOR

Lifter asal DKI Jakarta, Wahyu Apriana bertanding pada Kejuaraan Nasional Angkat Besi Senior di Gor Saparua, Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/7). Kejuaraan nasional yang digelar oleh Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI) tersebut diikuti 280 atlet dari 13 Provinsi di Indonesia serta digelar dalam rangka persiapan atlet untuk menghadapi PON XXI/2024 yang akan digelar di Sumatera Utara dan Aceh.

Pemkab Purwakarta Jaga Produktivitas Padi Hadapi Ancaman El Nino

PURWAKARTA (IM)- Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, tetap menjaga produktivitas tanaman padi di tengah ancaman kemarau panjang sebagai dampak dari fenomena alam El Nino.

“Produktivitas tanaman padi harus terjaga, agar target produksi padi tahun ini dapat tercapai,” kata Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika di Purwakarta, Jumat (21/7).

Untuk menjaga produksi padi dari dampak El Nino, ia menyampaikan langkah mitigasi menghadapi dampak El Nino harus dipersiapkan sejak awal dan secara matang.

Menurut dia, semua infrastruktur sumber daya air dikelola dengan baik untuk memastikan lahan pertanian memperoleh pasokan air selama musim kemarau.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Purwakarta, Sri Jaya Midan menyampaikan hingga kini pihaknya telah dan terus melakukan

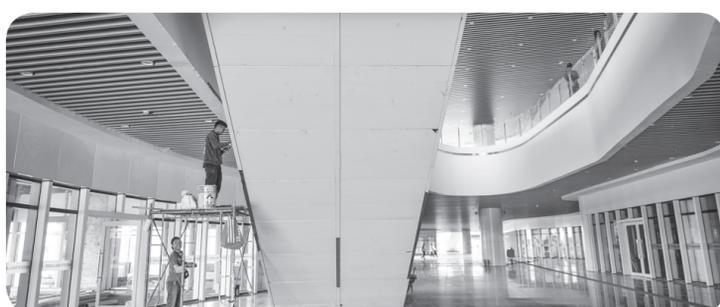
sejumlah langkah antisipasi menghadapi dampak El Nino.

“Mitigasi yang kita lakukan, selain mengoptimalkan semua infrastruktur sumber daya air adalah dengan membantu pengadaan bibit padi dari varietas yang bisa bertahan saat musim kemarau,” kata Midan.

Menurut dia, untuk langkah lainnya ialah dengan melakukan pendampingan terus menerus kepada para petani.

“Tim penyuluhan pertanian melakukan pendampingan secara intensif. Ini dimaksudkan agar petani dapat mengatasi berbagai dampak dari El Nino,” ujar Midan.

Menurut Midan, meski dibayang-bayangi dengan fenomena El Nino yang akan memperparah musim kemarau, pihaknya sangat optimis target produksi beras akan bisa tercapai. ● **pra**



KESIAPAN SARANA PENUNJANG KERETA CEPAT JELANG PERESMIAN

Pekerja menyelesaikan pekerjaan interior di Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/7). PT China Railway Group Limited (CREC) mencatat hingga Juli 2023, infrastruktur penunjang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KJOB) yang salah satunya merupakan Stasiun Tegalluar saat ini telah mencapai tahap penyelesaian akhir jelang peresmian.

Ridwan Kamil: Pungutan di Sekolah Harus Seizin Gubernur

BOGOR (IM)- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melarang pihak sekolah di wilayah Jawa Barat melakukan pungutan tanpa seizin Pemprov Jawa Barat. Pungutan ini disampaikan untuk merespons banyaknya sekolah yang melakukan pungutan dengan dalih sebagai inisiatif komite sekolah.

“Kan sudah ada pungutannya, tidak boleh ada pungutan tanpa izin gubernur, khususnya melalui dinas pendidikan,” tegas Ridwan Kamil saat meninjau proses pembangunan Jembatan Otista, Bogor, Jumat (21/7).

Seperti diketahui, Pemprov Jawa Barat telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang komite sekolah. Dalam pungut tersebut, komite sekolah memang diperbolehkan menggalang

dana, termasuk dari pihak orang tua siswa, hanya saja harus seizin gubernur.

Dalam perjalanannya, pungut ini ternyata dimanfaatkan oleh sekolah melalui komite sekolah untuk menggalang dana dari orang tua siswa dengan besaran antara Rp 50.000 hingga ratusan ribu rupiah. Pihak komite sekolah tetap melakukan penggalangan dana, meskipun tidak dilengkapi persetujuan dari gubernur.

Ridwan Kamil kembali menegaskan, adanya pungutan di sekolah tanpa izin dari Pemprov Jawa Barat bisa merugikan orang tua siswa. “Nanti kalau dilakukan, banyak hal-hal yang tidak perlu lalu diadakan, yang dirugikan adalah pihak orang tua,” kata Ridwan Kamil. ● **pra**

Perangi Vandalisme, DPKP Kota Bandung Minta Masyarakat Turut Berpartisipasi

BANDUNG (IM)- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung meminta masyarakat turut berpartisipasi aktif memelihara taman-taman di Kota Bandung. Utamanya dalam memerangi vandalisme yang masih marak terjadi.

Kepala Bidang (Kabid) Pertamanan DPKP Kota Bandung, Rieke Siti Fatimah mengatakan, Kota Bandung saat ini memiliki sebanyak 759. Taman-taman tersebut dipelihara secara rutin.

“Ada sejumlah persoalan yang dihadapi DPKP Kota Bandung dalam upaya menjaga keindahan dan kenyamanan ratusan taman publik. Masalah yang menjadi sorotan, antara lain vandalisme,” kata Rieke Siti Fatimah, Jumat (21/7).

Menurut Rieke, bentuk vandalisme yang banyak ditemui adalah coretan. Baik di dinding taman, fasilitas taman, dan sejumlah titik lainnya. Pihaknya menilai, pencegahan vandalisme di taman publik ini terkendala karena terbatasnya waktu tugas penjaga taman.

“Petugas kita memang berjaga hanya sampai jam

empat sore. Tapi, setiap taman kita sudah sediakan CCTV. Jadi pengawasannya lewat itu. Hanya saja saat ada vandalisme, ya kita tidak boleh bosan untuk mengecek ulang,” ucapnya.

Dikemukakan dia, ada tim yang disiapkan untuk melakukan perbaikan. “Untuk kerusakan fasilitas taman itu kita ada tim tersendiri, yaitu tim reaksi cepat. Jadi, jika ada kerusakan, kita langsung gerak cepat untuk memperbaiki,” ujar dia.

Terkait tunawisma yang menjadikan taman sebagai tempat persinggahan, serta pedagang kaki lima (PKL) yang masuk ke area taman, persoalan tersebut kerap dikeluhkan pengunjung taman.

Rieke pun selalu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penertiban tunawisma dan PKL yang berada di area taman.

“PKL itu sebenarnya banyaknya di luar taman. Kalau hari Minggu biasanya kita kolaborasi dengan Satpol PP, dan pihak kewilayahan untuk menjaga akses masuk agar tidak ada PKL yang masuk ke area taman,” tandasnya. ● **pra**